

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum optimalnya Implementasi Kebijakan (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam menanggulangi kemiskinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggambarkan berbagai fenomena atau realitas situasi dan kondisi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Salahutu. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara).

Program Tahunan PNPM mandiri perdesaan di kecamatan salahutu, dirumuskan berdasarkan hasil keputusan rapat forum musyawarah antar desa tentang penetapan usulan program kecamatan salahutu. Program tersebut dibagi dalam kategori yakni Sarana Prasarana, Kesehatan dan Pendidikan serta program Simpan Pinjam Perempuan untuk masing-masing desa. Masing-masing desa yang ada, menerima program ini dengan baik karena sangat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan di lingkungan mereka serta untuk pengembangan desa-desa tersebut kedepannya. Masyarakat sangat antusias dalam menjalankan kegiatan program fisik maupun non fisik. Hal ini terbukti di masing-masing desa dengan begitu banyaknya sarana prasarana yang sudah dibangun dan dapat dirasakan manfaatnya baik secara individu maupun kelompok. Memang tidak dapat dihindari bahwa selama pelaksanaan program ini masih ada kendala-kendala yang ditemukan.

Berdasarkan hasil Penelitian PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Salahutu, dapat diperoleh simpulan beragam dari pengalaman empiris khususnya berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan yaitu antara lain : (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa, baik di bidang sarana prasarana, pendidikan maupun kesehatan; (2) partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; (3) adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Pembangunan, Kemiskinan.